

Pengembangan kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal di Indonesia (kasus di Nagari Pariangan, Sumatera Barat) = Developing tourism policy based on local wisdom in indonesia (case in Nagari Pariangan Indigenous Village, West Sumatera)

Ikke Febriandhika, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20492910&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Fokus penelitian ini membahas terkait dengan pengembangan kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal di Indonesia (Kasus di Nagari Pariangan, Sumatera Barat). Adapun dalam pengembangan kebijakan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa mengabaikan kebutuhan lokal. Penelitian ini menggunakan kajian berbagai studi literatur terkait dengan konsep pengembangan pariwisata, sistem indigenous tourism, proses pengembangan kebijakan pariwisata, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata. Adapun kombinasi dari konsep-konsep tersebut menghasilkan tiga (3) buah aspek, yaitu aspek lingkungan, pengaturan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam aspek pengembangan lingkungan terkait dengan lingkungan fisik masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Dari aspek lingkungan ekonomi, pariwisata sudah memberikan peluang usaha bagi masyarakat, tetapi distribusi manfaat ekonominya masih belum merata karena belum adanya pemberlakuan retribusi dan pungutan terkait kegiatan pariwisata ini. Dari aspek politik sudah melibatkan berbagai stakeholders dalam perencanaan pengembangannya, tetapi belum adanya dukungan alokasi anggaran dan keuangan yang tetap, serta tidak adanya aturan yang jelas terkait keterlibatan swasta. Dari aspek sosialbudaya, masyarakat sudah sangat terbuka menerima pengunjung dan berkomitmen melestarikan tradisi budaya melalui berbagai kegiatan. Kemudian, dari aspek hubungan kelembagaan terkait dengan pembagian wewenang yang mayoritas pariwisata dikelola masyarakat dan nagari, sistem pengawasan masih belum tetap, kurangnya ketersediaan promosi yang profesional, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya, aspek pengembangan sumber daya manusia sudah ditematkannya pendamping lokal dan sudah dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat menunjukkan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terkait pariwisata dan adanya pemberian pendidikan dan pelatihan.

ABSTRACT

The focus of this study is to analyze the development of tourism policy based on local

wisdom in Indonesia (Case in Nagari Pariangan Indigenous Village, West Sumatra). In the development of tourism policy, it has to consider the principles of developing sustainable tourism without ignoring local needs. This study uses the various concepts as tourism development, system of indigenous tourism, process of tourism policy development, and influencing factors of tourism policy implementation. The combination of these concepts produces three aspects, namely the environmental aspect, institutional arrangements, and human resource development. This study used a postpositivist approach with a type of descriptive research. The technique of collecting data through semi-structured in-depth interviews and literature study. The results of this study show that it still needs the role of government in the aspect of environmental development related to the physical environment. In the economic aspect, tourism has provided employment opportunities for indigenous people, but the distribution of economic benefits is still not evenly distributed due to the lack of fees and levies regarding tourism activities. In the political aspect, it has involved various stakeholders in its development planning, but there has been no support for a fixed budget and financial resources, as well as the lack of regulation regarding private involvement. In the socio-cultural aspect, the community has been very receptive to tourists and is committed to preserving cultural traditions through various activities. Then, in the aspect of institutional relations related to the authority, that is the majority of tourism is managed by the indigenous people and Nagari, the uncertainty of the supervision system, lack of availability of professional promotions, and lack of communication and coordination between the government and indigenous people. Furthermore, local government have been assign local guide and Tourism Awareness Group (Pokdarwis) in aspects of human resource development. The development of human resources through community empowerment describes the increasing awareness of the indigenous people in tourism and the provision of education and training.